



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29
Jakarta

Tel. 021 3193 7223

email. persuratan@kpu.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20, Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi berupa:

1. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
2. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Tersedia Setiap Saat; dan
3. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta Merta.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Penetapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk

informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan Informasi Publik.

KETIGA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM,



CAHYO ARIAWAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2026

A. INFORMASI BERKALA

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik	Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
1	LAKIP 2025	Informasi Kinerja Instansi Pemerintah	Biro Perencanaan dan Organisasi	Sekretaris Jenderal KPU	Jakarta, 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	
2	Laporan Keuangan 2025	Ringkasan Laporan Keuangan yang telah di audit	Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal KPU	Jakarta, 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	
3	Tapkin KPU 2026	Informasi Kinerja Instansi Pemerintah	Biro Perencanaan dan Organisasi	Sekretaris Jenderal KPU	Jakarta, 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	
4	Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID KPU	Jakarta, 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	
5	RUP	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Logistik	Sekretaris Jenderal KPU	Jakarta, 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

6	LHKPN	Informasi tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	Inspektorat	Ketua KPU	Jakarta, 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
7	DIPA/RKA	Informasi tentang Program Kegiatan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Sekretaris Jenderal KPU	Jakarta, 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Mengatur tentang pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan	Biro Hukum	Ketua KPU	Jakarta, 11 November 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Penyelenggara Pemilu

		Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota , Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Syarat Calon Pengganti Antarwaktu, Verifikasi Calon						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Pengganti Antarwaktu, Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu, Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu, Koordinasi Penggantian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu di Daerah Khusus, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup						
9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan	Mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi	Biro Hukum	Ketua KPU	Jakarta, 22 Desember 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

	Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyempurnaan struktur pengelola informasi dan dokumentasi, klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta tata cara pengujian konsekuensi						
10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029	Mengatur tentang rencana strategis KPU Tahun 2025-2029 yang merupakan	Biro Hukum	Ketua KPU	Jakarta, 31 Desember 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

		dokumen perencanaan KPU untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029						
11	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu ketentuan formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan ketentuan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB.	Biro Hukum	Ketua KPU	Jakarta, 08 Juli 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
12	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran	Rincian Anggaran KPU	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, 1 Desember 2025	Pagu anggaran yang diterima	2 Tahun	Informasi Berkala

	2026		dan Organisasi			KPU untuk melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsi KPU selama 1 Tahun		
13	Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Tahun 2026	Dokumen perjanjian kinerja yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Inspektur Wilayah I Tahun 2026.	Inspektorat Wilayah I	Inspektur Wilayah I	Tahun 2026, Jakarta	Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak	Sesuai JRA KPU yang berlaku	Informasi berkala; dipublikasikan setelah ditetapkan.
14	Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I	Bagian dan uraian struktur organisasi Inspektorat Wilayah I yang menunjukkan hubungan	Inspektorat Wilayah I	Inspektur Wilayah I	Dimutakhirkan sesuai perubahan organisasi, Jakarta	Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak	Dimutakhirkan sesuai perubahan dan JRA KPU yang berlaku	Informasi berkala/setiap saat; menggunakan struktur organisasi yang telah

		kedudukan dan fungsi unit kerja						ditetapkan secara resmi
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------

B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik	Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
1	Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025	Ringkasan daftar informasi yang wajib tersedia berkala, wajib tersedia setiap saat dan wajib tersedia serta merta	Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Logistik, Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,	Atasan PPID KPU	September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	1 Tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

			Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara, Inspektorat, Pusat Pengembang an Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi						
2	Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan								
	1)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan	Ketentuan tentang pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, Calon	Biro Hukum	Ketua KPU	Jakarta, 11 November 2025	Dokumen Digital/ Softcopy	5 tahun	Pengaturan Penyelenggara Pemilu

		Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Syarat Calon Pengganti Antarwaktu, Verifikasi Calon						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			Pengganti Antarwaktu, Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu, Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu, Koordinasi Penggantian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu di Daerah Khusus, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup						
	2)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi	Mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Hukum	Ketua KPU	Jakarta, 22 Desember 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

		Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	perlu dilakukan penyempurnaan struktur pengelola informasi dan dokumentasi, klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta tata cara pengujian konsekuensi						
	3)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029	Mengatur tentang rencana strategis KPU Tahun 2025- 2029 yang merupakan dokumen perencanaan KPU untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029	Biro Hukum	Ketua KPU	Jakarta, 31 Desember 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
	4)	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi	Mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu ketentuan formulir	Biro Hukum	Ketua KPU	Jakarta, 08 Juli 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>		Pengaturan Penyelenggaraa n Pemilu dan Pilkada Serentak

		Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan ketentuan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB						
	5)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 783 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu	Ketua KPU	Jakarta, 12 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Penyelenggaraa n Pemilu Serentak Tahun 2024
	6)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 805 Tahun 2025 tentang Pencabutan atas	Ketentuan tentang Pencabutan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum	Biro Hukum	Ketua KPU	Jakarta, 16 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum	Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum						
	7)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Umum	Ketua KPU	Jakarta, 25 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
	8)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan	Inspektorat Utama	Ketua KPU	Jakarta, 26 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara

		Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						Pemilu
	9)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Inspektorat Utama	Ketua KPU	Jakarta, 21 Oktober 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
	10)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor	Ketentuan tentang Pedoman Teknis	Inspektorat Utama	Ketua KPU	Jakarta, 4 November	Dokumen Digital/	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan

		981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota			2025	<i>Softcopy</i>		Penyelenggara Pemilu
	11)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Keuangan	Ketua KPU	Jakarta, 20 November 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
	12)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem	Inspektorat Utama	Ketua KPU	Jakarta, 5 Desember 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara

		tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						Pemilu
	13)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1119 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025	Ketentuan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025	Kepala Bidang Data dan Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	17 Desember 2025 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak)	Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun	Pengaturan Penyelenggara n Pemilu dan Pilkada Serentak
	14)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2026 tentang	Ketentuan tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan	Biro Hukum	Ketua KPU	Jakarta, 13 Januari 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara

		Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026	Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026						Pemilu
	15)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Ketua KPU	Jakarta, 23 Februari 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
	16)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2026 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau	Ketentuan tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau	Biro Keuangan	Ketua KPU	Jakarta, 26 Februari 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

		Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						
	17)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU	Jakarta, 8 April 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
	18)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang	Ketentuan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis	Biro Sumber Daya Manusia	Ketua KPU	Jakarta, 4 Mei 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

		Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						
	19)	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 264 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026	Ketentuan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026	Kepala Bidang Data dan Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	20 Juli 2026 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak)	Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun.	
	20)	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1922 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat	Inspektorat Utama	Sekretaris Jenderal KPU	Jakarta, 04 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

		Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						
	21)	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Umum	Sekretaris Jenderal KPU	Jakarta, 19 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
3	nota kesepahaman, perjanjian dengan pihak ketiga terkait penyelenggara Pemilu dan Pemilihan								
	1)	Kementerian Agama Republik Indonesia	Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	15 September 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	40/PR.07-NK/01/2023

			Pemilu dan Pilkada Tahun 2024						
	2)	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Bidang Kepemudaaan dan Keolahragaan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	15 September 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	41/PR.07-NK/01/2023
	3)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	15 September 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	42/PR.07-NK/01/2023
	4)	Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Kapasitas SDM dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	19 September 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	45/PR.07-NK/01/2023
	5)	Badan Riset dan Inovasi	Pemanfaatan Ilmu	Biro	Ketua KPU	19	Dokumen	Berlaku untuk	46/PR.07-

		Nasional	Pengetahuan dan Teknologi Serta Pengembangan SDM dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Perencanaan dan Organisasi		September 2023	Digital/ <i>Softcopy</i>	jangka waktu 5 (lima) tahun.	NK/01/2023
	6)	Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	2 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	48/PR.07-NK/01/2023
	7)	Organisasi Amatir Radio Indonesia	Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	10 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	50/PR.07-NK/01/2023
	8)	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama	Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	13 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	51/PR.07-NK/01/2023
	9)	Komisi Informasi Pusat	Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan Prinsip	Biro Perencanaan dan	Ketua KPU	16 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	52/PR.07-NK/01/2023

			Keterbukaan Informasi Publik	Organisasi					
	10)	Panitia Pelaksana Program Talkshow dan Watung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit	Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	20 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	54/PR.07- NK/01/2023
	11)	Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia	Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Politik pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	24 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	56/PR.07- NK/01/2023
	12)	Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	24 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	57/PR.07- NK/01/2023
	13)	Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas	Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	24 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	58/PR.07- NK/01/2023

			Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap WNI						
	14)	PT. Nusantara Media Mandiri (Nusantara TV)	Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	24 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	59/PR.07-NK/01/2023
	15)	PT Trans Media Corpora	Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	24 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	60/PR.07-NK/01/2023
	16)	PT Visi Media Asia Tbk	Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	26 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	61/PR.07-NK/01/2023

	17)	Perkumpulan Anak Muda Analitis	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	30 Oktober 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	62/PR.07-NK/01/2023
	18)	Komisi Yudisial Republik Indonesia	Sinergitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas dalam rangka menjaga dan menegakan Integritas Hakim serta Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	8 November 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	63/PR.07-NK/01/2023
	19)	Komisi Nasional Disabilitas	Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	24 November 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	66/PR.07-NK/01/2023
	20)	Parisada Hindu Dharma Indonesia	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	29 November 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	68/PR.07-NK/01/2023

			Pemilu dan Pilkada Tahun 2024						
	21)	Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	29 November 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	69/PR.07-NK/01/2023
	22)	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	29 November 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	71/PR.07-NK/01/2023
	23)	UIN Mataram	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	19 Desember 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	73/PR.07-NK/01/2023

	24)	Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah	Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang LuBerJurDil	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	21 Desember 2023	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	76/PR.07-NK/01/2023
	25)	Asosiasi Media Siber Indonesia	Pelaksanaan Cek Fakta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Selasa, 02 Januari 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 3 (tiga) tahun	1/PR.07-NK/01/2024
	26)	PT Metropolitan Televisindo	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Selasa, 02 Januari 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku hingga berakhirnya seluruh tahapan, program dan jadwal Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	2/PR.07-NK/01/2024

			Walikota Tahun 2024					
27)	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemilihan Umum dan Jaminan Kesehatan Nasional	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Senin, 15 Januari 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 3 (tiga) tahun	3/PR.07-NK/01/2024
28)	Universitas Tidar	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Senin, 29 Januari 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	4/PR.07-NK/01/2024
29)	Otoritas Jasa Keuangan	Kerja Sama Dalam Bidang Kepemiluan dan Jasa Keuangan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Senin, 22 April 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	7/PR.07-NK/01/2024
30)	Universitas Diponegoro	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Selasa, 04 Juni 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	11/PR.07-NK/01/2024
31)	Universitas Kristen Satya Wacana	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan	Biro Perencanaan	Ketua KPU	Selasa, 04 Juni 2024	Dokumen Digital/	Berlaku 5 (lima) tahun	12/PR.07-NK/01/2024

			Tinggi Dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi	dan Organisasi			<i>Softcopy</i>		
	32)	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelembagaan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Selasa, 25 Juni 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	18/PR.07- NK/01/2024
	33)	Universitas Negeri Semarang	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Jumat, 30 Agustus 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	29/PR.07- NK/01/2024
	34)	Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam	Sosialisasi Pendidikan Pilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Senin, 09 September 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	33/PR.07- NK/01/2024

			Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024						
	35)	Kementerian Hukum Republik Indonesia	Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Jumat, 24 Januari 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	5/HK.05- NK/01/2025
	36)	Badan Pusat Statistik	Penyediaan, Pertukaran, dan Pemanfaatan Data Dalam Rangka Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik di Bidang Kepemiluan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Jumat, 14 Maret 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	12/HK.05- NK/01/2025
	37)	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Rabu, 04 Juni 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	17/HK.05- NK/01/2025
	38)	Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, Perisai Demokrasi Bangsa, Sindikasi	Peningkatan Tata Kelola Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Senin, 14 Juli 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	20/HK.05- NK/01/2025

		Pemilu dan Demokrasi, dan Akademi Pemilu dan Demokrasi	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota						
	39)	Badan Intelijen Negara	Meningkatkan Kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keamanan dan Kerahasiaan Informasi serta Koordinasi Intelijen Negara	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Rabu, 30 Juli 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	26/HK.05-NK/01/2025
	40)	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Pengembangan dan Pemanfaatan Perpustakaan serta Program Tematik Literasi Pemilihan Umum dan Pemilihan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Senin, 08 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	27/HK.05-NK/01/2025

			Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota						
	41)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Senin, 15 Desember 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	35/HK.05-NK/01/2025
	42)	Kejaksaan Republik Indonesia	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Rabu, 11 Maret 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	1/HK.05-NK/01/2026
	43)	Komisi Pemilihan Pusat Federasi Rusia	Kerjasama di Bidang Manajemen Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan	Ketua KPU	Senin, 06 April 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	Berlaku 5 (lima) tahun	-

				Organisasi					
	44)	Institut Transportasi dan Logistik Trisakti	Pengembangan Tata Kelola Logistik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Deputi Bidang Dukungan Teknis	Ketua KPU	Senin, 30 Maret 2026	Dokumen Digital/ Softcopy	Berlaku 5 (lima) tahun	2/HK.05-NK/01/2026
	45)	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Sinergi Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih Bagi Pekerja Migran Indonesia	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Rabu, 13 Mei 2026	Dokumen Digital/ Softcopy	Berlaku 5 (lima) tahun	3/HK.05-NK/01/2026
	46)	Arsip Nasional Republik Indonesia	Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Rabu, 13 Mei 2026	Dokumen Digital/ Softcopy	Berlaku 5 (lima) tahun	4/HK.05-NK/01/2026
	47)	Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi	Sinergitas Penguatan Transparansi Informasi, Pemberitaan, dan Literasi Demokrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Rabu, 13 Mei 2026	Dokumen Digital/ Softcopy	Berlaku 5 (lima) tahun	5/HK.05-NK/01/2026

			Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota						
4	informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan								
	a	Informasi Hasil Pemilu							
		1	Hasil Pemilu 2004	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2004	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun
		2	- Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2009	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2009	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun
			- Hasil Pemilu DPR RI 2009	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2009	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun
			- Hasil Pemilu DPRD Provinsi dan Kab/Kota 2009	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2009	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun

3	- Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2014	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
	- Hasil Pemilu DPR RI 2014	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2014	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
	- Daftar Alokasi Kursi DPR RI 2014	Jumlah alokasi kursi DPR RI	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2014	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
	- Daftar Calon Terpilih DPR RI 2014	Nama Calon Terpilih berdasarkan asal Partai Politik	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2014	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
	- Daftar Calon Terpilih DPD RI 2014		Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2014	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
	- Daftar Calon Terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota 2013	Nama Calon Terpilih berdasarkan asal Partai Politik	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2014	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
	- Data tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2014	Tingkat partisipasi Pemilih per Provinsi	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2014	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

		4	- Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2019	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2019	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
			- Hasil Pemilu DPR RI 2019	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2019	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
		5	- Daftar Calon Tetap DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilu 2024	Profil calon	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
			- Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2024	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
			- Hasil Pemilu DPR RI 2025	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
	b	Informasi Hasil Pemilihan								
		1	Rekapitulasi Hasil	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis		2010	Dokumen	5 Tahun	

			Pemilihan Tahun 2010		Penyelenggara an Pemilu			Digital/ <i>Softcopy</i>		
		2	Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2011	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2011	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
		3	Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2012	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2012	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
		4	Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2013	Hasil rekapitulasi	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2013	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
		5	Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2015	Hasil rekapitulasi dan infografis	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2015	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
		6	Hasil Pemilihan Tahun 2017	hasil rekapitulasi dan infografis	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2017	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
		7	Hasil Pemilihan Tahun 2018	hasil rekapitulasi dan infografis	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2018	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
		8	Data NPHD Pemilihan Tahun	rekap dan naskah NPHD Pemilihan	Biro Keuangan		2020	Dokumen Digital/	5 Tahun	

			2020	2020				<i>Softcopy</i>		
		9	Hasil Pemilihan Tahun 2024	hasil rekapitulasi dan infografis	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
5	Informasi yang dinyatakan terbuka pasca sidang putusan Komisi Informasi Pusat									
	a	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Komisi Pemilihan Umum								
		1	Data <i>real count</i> dalam bentuk data mentah seperti file <i>csv</i> harian		Pusat Data dan Teknologi Informasi		2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
	b	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Komisi Pemilihan Umum								
		1	Informasi rincian infrastruktur IT KPU terkait Pemilu 2024 termasuk: 1. Topologi; 2. Rincian server-server		Pusat Data dan Teknologi Informasi		2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

			fisik;							
			3. Server-server cloud dan jaringan;							
			4. Lokasi setiap alat dan jaringan;							
			5. Rincian alat-alat keamanan siber seperti CDN, Ddos protection, dll; dan							
			6. Rincian layanan-layanan Alibaba Cloud, termasuk proses pengadaan dan kontrak antara KPU (atau							

			perwakilanny a) dan Alibaba Cloud							
	c	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1075 Tahun 2025 tentang Penetapan Informasi Berupa Dokumen Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Berupa Salinan Ijazah Sebagai Informasi Terbuka								
		1	Informasi Berupa Dokumen Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Berupa Salinan Ijazah yang memuat: 1. Nomor Kertas Ijazah; 2. Nomor Ijazah; 3. Nomor Induk Mahasiswa; 4. Tanggal Lahir; 5. Tempat Lahir; 6. Tanda Tangan Pejabat Legalisir;		Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu		2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

			7. NIP Pejabat Legalisir; 8. Tanda Tangan Rektor; 9. Tanda Tangan Dekan Fakultas.							
6	Informasi yang dikuasai Unit Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal KPU									
	a	Informasi yang dikuasai Pusat Data dan Teknologi Informasi								
		1	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2594 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Menetapkan Pembentukan Tim Zona Integritas di Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Bidang Aplikasi dan Tata kelola Teknologi Informasi, Kepala Bidang Data dan Informasi, dan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	7 November 2025 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak)	Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun	

		2	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2595 Tahun 2025 tentang Pembentukan Agen Perubahan di Pusat Data dan Teknologi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Menetapkan Pembentukan Agen Perubahan di Pusat Data dan Teknologi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Bidang Aplikasi dan Tata kelola teknologi Informasi, Kepala Bidang Data dan Informasi, dan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	7 November 2025 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak)	Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun	
		3	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2142 Tahun 2025 tentang Tim Rekonsiliasi Data di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Rekonsiliasi Data di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran pelaksanaan proses	Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	24 September 2025 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak)	Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun	

			Pemilihan Umum	koordinasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian data secara terintegrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.						
		4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum	Pedoman resmi penggunaan tanda tangan dan sertifikat elektronik di lingkungan KPU , KPU daerah (provinsi dan kabupaten/kota), serta sekretariat terkait.	Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	23 Februari 2026 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak	Aktif 5 tahun	
		5	Keputusan	Membentuk Tim	Kepala Bidang	Kepala Pusat	10 April 2026	Softcopy	Aktif 1 tahun,	

			Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 589 Tahun 2026 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Komisi Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal	Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Komisi Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal	Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	Data dan Teknologi Informasi	di Jakarta	(PDF), Hardcopy (dokumen cetak)	Inaktif 2 tahun	
		6	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawasan Pengadaan Swakelola Tipe II pada Kegiatan Pusat Data dan Teknologi	Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawasan Pengadaan Swakelola tipe II Pada Kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2026 di Komisi Pemilihan Umum;	Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	2 Februari 2026 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak)	Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun	

			Informasi Tahun Anggaran 2026 di Komisi Pemilihan Umum							
		7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1119 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025	Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025, yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Nasional-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	17 Desember 2025 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak)	Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun	
		8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun	Peraturan Komisi ini mengubah beberapa ketentuan dalam	Kepala Bidang Data dan Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi	8 Juli 2026 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy	Aktif 5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara

			2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu ketentuan formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan ketentuan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB		Informasi		(dokumen cetak		Pemilu
		9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 264 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026	Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026, yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Nasional-PDPB sebagaimana	Kepala Bidang Data dan Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	20 Juli 2026 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak	Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun.	

				tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.						
	b	Informasi yang dikuasai Biro Perencanaan dan Organisasi								
		1	Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Perpustakaan serta Program Tematik Literasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan	Pengembangan sumber daya perpustakaan dan jasa informasi mengenai literasi Pemilu dan Pemilihan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, 08/09/2025	Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU	1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen	

			Wakil Walikota							
		2	Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Penguatan sinergi dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam rangka menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang responsif gender dan ramah anak, serta pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak dalam Pemilu dan Pemilihan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, 15/12/2025	Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU	1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen	

		3	Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan, serta pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, 11/03/2026	Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU	1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen	
		4	Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti tentang Pengembangan Tata Kelola Logistik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil	Pengembangan tata kelola logistik dalam Pemilu dan Pemilihan melalui beragam cara seperti pendidikan dan pelatihan, dukungan penyusunan kebijakan strategis/teknis, hingga pertukaran dan pemanfaatan data	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, 30/03/2026	Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU	1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen	

			Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota						
		5	Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Sinergi Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih Bagi Pekerja Migran Indonesia	Penguatan sinergi dalam memperluas akses hak pilih pemekerja migran melalui sosialisasi dan edukasi dukungan fasilitas akses koordinasi dengan perwakilan RI dan jejaring PMI, hingga koordinasi pendataan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta. 13/05/2026	Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU	1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen
		6	Nota Kesepahaman antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan	Penguatan bidang kearsipan seperti pertukaran dan pemanfaatan data, penyelamatan, dan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, 13/05/2026	Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU	1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen

			Umum tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	perlindungan arsip, pengembangan SDM, hingga dukungan fasilitas sarana prasarana						
		7	Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Koalisi Pemuda Pemilu dan Demokrasi tentang Sinergitas Penguatan Transparansi Informasi, Pemberitaan, dan Literasi Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil	Dukungan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu dan Pemilihan, dukungan analisis kebijakan strategis mengenai transparansi informasi dan literasi demokrasi, penguatan kapasitas SDM serta mengadakan wadah diskusi dan produksi informasi serta konten edukatif kepemiluan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, 13/05/2026	Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU	1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen	

			Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota							
		8	Memorandum Saling Pengertian antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Pusat Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Manajemen Pemilihan Umum	MSP antara KPU RI dan CEC Rusia ditandatangani pada 6 April 2026 di Moskwa, Federasi Rusia oleh Mochammad Afifuddin (ketua KPU) dan Ella Pamfilova (ketua CEC Rusia), bertujuan untuk memperkuat kerja sama pengembangan manajemen pemilihan umum berdasarkan nilai-nilai demokrasi, dengan ruang lingkup pengembangan SDM dan pertukaran pengetahuan di bidang informasi, dan teknologi kepemiluan melalui FGD	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Senin, 06 April 2026 Moskwa, Federasi Rusia	<i>Soft file</i> Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU	1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen	

				lokakarya, konferensi internasional, dan pelatihan						
		9	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU, Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Administrasi, dan Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2025	Sebuah dokumen pertanggungjawaban yang disusun oleh instansi pemerintah untuk melaporkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Laporan ini merupakan bagian dari (SAKIP) dan bertujuan untuk memberikan informasi terukur mengenai kinerja, menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, Tahun 2026	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ketua KPU Tahun 2025 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretaris Jenderal KPU Tahun 2025 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	2 Tahun	

				meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik				Deputi Bidang Administrasi Tahun 2025 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2025		
		10	Perjanjian Kinerja Lembaga Eselon I dan Eselon II	Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, Tahun 2026	1. Perjanjian Kinerja Ketua KPU Tahun 2026 2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun	2 Tahun	

				indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia				2026 3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Administ asi Tahun 2026 4. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Teknis Tahun 2026 5. Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2026 6. Perjanjian Kinerja Kepala Biro		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								Perencana an dan Organisasi Tahun 2026 7. Perjanjian Kinerja Kepala Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2026 8. Perjanjian Kinerja		
		11	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026	Rincian Anggaran KPU	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, 1 Desember 2025	Pagu anggaran yang diterima KPU untuk melaksanaka n setiap tugas pokok dan fungsi KPU selama 1 Tahun	2 Tahun	Informasi Berkala

		12	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029	Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, 31 Desember 2025	Rencana kerja KPU selama 5 Tahun, dalam melaksanakan kebijakan Presiden melalui RPJMN yang telah ditetapkan, sebagai pengejawantahan program prioritas Nasional Pemerintah yang diampu oleh KPU	3 Tahun	Informasi Setiap Saat
		13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Jakarta, 28 Januari 2026	Rincian langkah kerja yang harus dipedomani satker KPU Provinsi dan	2 Tahun	Informasi Dikecualikan

			Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026	Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026				KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola perencanaan kegiatan dan anggaran masing - masing satker TA 2026		
	c	Informasi yang dikuasai Biro Hukum								
		1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat	Dalam Peraturan ini mengatur mengenai pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu, termasuk ketentuan mengenai Calon Pengganti Antarwaktu serta proses verifikasi dan kualifikasinya. Selain itu, diatur pula	Biro Hukum	Ketua KPU	11 November 2025, Jakarta	Dokumen digital/Softcopy	5 (lima) tahun	Pengaturan Penyelenggara Pemilu

			Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	mengenai sistem informasi manajemen penggantian antarwaktu, koordinasi dalam pelaksanaan penggantian antarwaktu, serta ketentuan penggantian antarwaktu di Daerah Khusus						
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi	Peraturan ini mengatur perubahan struktur pengelola informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, tata cara pengujian konsekuensi informasi publik pada KPU dan KPU Provinsi, pelayanan atas permintaan	Biro Hukum	Ketua KPU	22 Desember 2025, Jakarta	Dokumen digital/softcopy	5 (lima) tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

			Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	informasi publik, serta prosedur pengajuan keberatan.						
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029	Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis KPU untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan.	Biro Hukum	Ketua KPU	31 Desember 2025, Jakarta	Dokumen digital/softcopy	5 (lima) tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
		4	Peraturan Komisi	Peraturan ini	Biro Hukum	Ketua KPU	8 Juli 2026,	Dokumen	5 (lima) tahun	Pengaturan

			Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	mengatur perubahan formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran dan pemilih berkelanjutan			Jakarta	digital/softcopy		Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
	d	Informasi yang dikuasai Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu								
		1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,	Peraturan dimaksud mengatur mengenai tata cara dan mekanisme penggantian antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Ketua KPU	Jakarta, 11 November 2025	Softcopy	Selamanya selama tidak ada perubahan	Dipublikasikan pada Portal JDIH KPU

			dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota						
		2	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Semester II Tahun 2025	Memuat rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol pada Semester II Tahun 2025	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu	Ketua KPU	Jakarta, 31 Desember 2025	Dokumen Digital/PDF	5 tahun
		3	Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Semester II Tahun 2025	Memuat rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data setiap Partai Politik yang melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan melalui Sipol pada semester II Tahun 2025, sejumlah 21 Partai	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu	Ketua KPU	Jakarta, 31 Desember 2025	Dokumen Digital/PDF	5 tahun

				Politik						
		4	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Semester I Tahun 2026	Memuat rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol pada Semester I Tahun 2026	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu	Ketua KPU	Jakarta, 30 Juni 2026	Dokumen Digital/PDF	5 tahun	
		5	Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Semester I Tahun 2026	Memuat rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data setiap Partai Politik yang melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan melalui Sipol pada Semester I Tahun 2026, sejumlah 23 Partai Politik	Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu	Ketua KPU	Jakarta, 30 Juni 2026	Dokumen Digital/PDF	5 tahun	
	e	Informasi yang dikuasai Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara								
		1	Daftar Aset	Daftar Barang Milik	Bagian	Bagian	https://sim	a. Data jenis,	-	Data dan

				Negara pada Komisi Pemilihan Umum sesuai Laporan Barang Pengguna Periode Semester Tahun 2025 Audited	Pengelolaan BMN	Pengelolaan BMN	an.kemenkeu.go.id/	jumlah, dan identitas BMN lainnya; b. Dokumen perolehan BMN; c. Dokumen kepemilikan BMN;		Informasi aset mencakup BMN pada Sekretariat Jenderal KUP, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kot a
		2	Surat Perjanjian atas Pengelolaan BMN	Surat dan naskah perjanjian atas Pengelolaan BMN pada KPU	Bagian Pengelolaan BMN	Bagian Pengelolaan BMN	Sekretariat Jenderal KUP, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota	a. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah; b. Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BMN	-	Dokumen perolehan atau penyerahan BMN dan perjanjian sewa atas pemanfaatan BMN dengan pihak lain
		3	Data Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Data dan informasi mengenai Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	https://data.inaproc.id/rup	a. Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) b. Data paket	-	Informasi RUP dapat diakses secara terbuka melalui Portal Data INAPROC dan dapat

								pengadaan dan nilai/pagu pengadaan ; c. Informasi satuan kerja dan sumber dana.		diperbarui sesuai dengan pemutakhiran data oleh K/L/PD
		4	Data Realisasi Pengadaan Barang/Jasa	Data dan informasi mengenai realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	https://data.inaproc.id/realisasi	a. Informasi realisasi Pengadaan Barang/Jasa; b. Data paket dan penyedia barang/jasa; c. Informasi jenis dan metode pengadaan ; d. Status	-	Informasi realisasi Pengadaan Barang/Jasa dapat diakses secara terbuka melalui Portal Data INAPROC dan dapat diperbarui sesuai dengan pemutakhiran data transaksi/realisasi pengadaan.

								dan nilai realisasi pengadaan .		
	f	Informasi yang dikuasai Biro Keuangan								
		1	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited)	Biro Keuangan	Biro Keuangan	Mei 2026	Hard Copy dan Soft Copy	10 Tahun	-
	g	Informasi yang dikuasai Inspektorat Wilayah I								
		1	Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2025	Dokumen yang memuat pertanggungjawaban dan capaian kinerja Inspektorat Wilayah I selama Tahun 2025, termasuk realisasi target dan tindak lanjut perbaikan	Inspektorat Wilayah I	Inspektur Wilayah I	Tahun 2025, Jakarta	Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak	Sesuai JRA KPU yang berlaku	Informasi publik yang dapat diberikan setelah memastikan tidak memuat informasi yang dikecualikan.
		2	Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Tahun 2026	Dokumen perjanjian kinerja yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Inspektur Wilayah I Tahun	Inspektorat Wilayah I	Inspektur Wilayah I	Tahun 2026, Jakarta	Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak	Sesuai JRA KPU yang berlaku	Informasi berkala; dipublikasikan setelah ditetapkan.

				2026.						
		3	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkungan KPU.	Sekretariat Jenderal KPU/Inspektorat Utama KPU sesuai penguasaan dokumen	Sekretaris Jenderal KPU	Tahun 2025, Jakarta	Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak	Sesuai JRA KPU yang berlaku	Informasi publik berupa produk kebijakan yang telah ditetapkan
		4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 916 Tahun 2025 Tentang Pemberian Reward	Keputusan mengenai pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas pencapaian kinerja	Inspektorat Utama KPU/Sekretariats Jenderal KPU sesuai	Komisi Pemilihan Umum	Tahun 2025, Jakarta	Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak	Sesuai JRA KPU yang berlaku	Informasi publik berupa produk keputusan yang telah

			dan Punishment Atas Pencapaian Kinerja Melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	penguasaan dokumen					ditetapkan; data pribadi atau informasi lain yang dikecualikan tidak dibuka.
		5	Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I	Bagian dan uraian struktur organisasi Inspektorat Wilayah I yang menunjukkan hubungan kedudukan dan fungsi unit kerja	Inspektorat Wilayah I	Inspektur Wilayah I	Dimutakhirkan sesuai perubahan organisasi, Jakarta	Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak	Dimutakhirkan sesuai perubahan dan JRA KPU yang berlaku	Informasi berkala/setiap saat; menggunakan struktur organisasi yang telah ditetapkan secara resmi
		Informasi Yang dikuasai Inspektorat Wilayah III								
	h	1	Laporan Kinerja	Dokumen yang	Inspektorat	Inspektur	Tahun	Dokumen	Sesuai JRA	Informasi

			Inspektorat Wilayah III Tahun 2025	memuat pertanggungjawaban dan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III selama Tahun 2025, termasuk realisasi target dan tindak lanjut perbaikan.	Wilayah III	Wilayah III	2025, Jakarta	elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak	KPU yang berlaku	publik yang dapat diberikan setelah memastikan tidak memuat informasi yang dikecualikan
		2	Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Tahun 2026	Dokumen perjanjian kinerja yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Inspektur Wilayah III	Inspektorat Wilayah III	Inspektur Wilayah III	Tahun 2026, Jakarta	Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak	Sesuai JRA KPU yang berlaku	Informasi berkala; dipublikasikan setelah ditetapkan.
		3	Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah III	Bagian dan uraian struktur organisasi Inspektorat Wilayah III yang menunjukkan hubungan kedudukan dan fungsi unit kerja	Inspektorat Wilayah III	Inspektur Wilayah III	Dimutakhirkan sesuai perubahan organisasi, Jakarta	Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak	Dimutakhirkan sesuai perubahan dan JRA KPU yang berlaku	Informasi berkala/setiap saat; menggunakan struktur organisasi yang telah ditetapkan secara resmi
		4	Surat Edaran	Surat Edaran	Sekretariat	Komisi	Tahun	Dokumen	Sesuai JRA	Dicantumkan

			Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	mengenai kewajiban menyampaikan LHKAN bagi setiap Aparatur Negara di Lingkungan KPU, baik melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) maupun SPT Pajak Tahunan	Jenderal KPU/Inspektorat Utama KPU sesuai penguasaan dokumen	Pemilihan Umum	2023, Jakarta	elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak	KPU yang berlaku	sebagai informasi publik sepanjang telah ditetapkan dan tidak memuat bagian yang dikecualikan.
	i	Informasi yang dikuasai Biro Logistik								
		1.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024	tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta	Biro Logistik	Biro Hukum_JDIH	Jakarta, 4 September 2024	https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/ILTZCe3cFjY5MemNWW7YumdOM01mOFVPNm1PUVFUODk0MmxXK1E9PQ	Tidak ada batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan	

				Walikota dan Wakil Walikota						
		2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 902 Tahun 2024	tentang Jumlah Kekurangan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Biro Logistik	Biro Hukum_JDIH	Jakarta, 8 Juli 2024	https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/g4FUZjdJb1bjXM10iAnuw1dGZEFXUS8ySnJQVEVHdDlMeUx3Smc9PQ	Tidak ada batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan	
		3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024	tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur	Biro Logistik	Biro Hukum_JDIH	Jakarta, 23 September 2024	https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/bROOJTcJmILJ3lGWN82sEmNsUUNZZjRtejZJSU5hVmNiSFg3K3c9PQ	Tidak ada batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan	

				dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota						
		4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429 Tahun 2024	tentang Tanda Khusus Berupa Kode Respons Cepat (Quick Response Code) pada Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Biro Logistik	Biro Hukum_JDIH	Jakarta, 4 Oktober 2024	https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/eV-1P9bwhOi2I84yn_lakhSdUx6L1UwdzkxWk9qcWNGWWMxa2c9PQ	Tidak ada batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan	
		5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024	tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Biro Logistik	Biro Hukum_JDIH	Jakarta, 18 Oktober 2024	https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/x78vzC6PUsoXT4PcJTC92ZIVXBQOC9kWjVUMStsanhOZU54bnc9	Tidak ada batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan	

								PQ		
		6	Buku Profil Tata Kelola Logistik Pemilu Tahun 2024	Tentang : gambaran mengenai pelaksanaan tata kelola Logistik Pemilu Tahun 2024 yang mencakup seluruh proses mulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, pendistribusian pemeliharaan, dan inventarisasi Logistik Pemilu, hingga pemusnahan kelebihan surat suara karena lebih kirim dan/atau rusak.	Biro Logistik	Biro Hukum_JDIH	Jakarta	https://drive.google.com/drive/folders/11ZSvoflVUVxTMWQcOKhGnpGUtCw9qKy9	Tidak ada batas waktu	
		7	Buku 75 Hari Perjalanan Logistik Pemilu 2024	Tentang : Tantangan Tata Kelola Logistik Pemilu 2024, dimulai dari Perencanaan, Pengadaan sampai dengan Distribusi	Biro Logistik	Biro Logistik	Jakarta,25 November 2024	https://drive.google.com/drive/folders/11ZSvoflVUVxTMWQcOKhGnpGUtCw9qKy9	Tidak ada batas waktu	

				Logistik Pemilu 2024 dimana Durasi Waktu tahapan Kampanye sangat singkat, yang berdampak kepada proses ketersediaan logistik Pemilu 2024				9qKy9		
	j	Informasi yang dikuasai Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia								
		1	Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	<i>Electoral Governance</i> : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia merupakan Jurnal Resmi yang diterbitkan oleh KPU RI bekerjasama dengan Konsorsium Tata Kelola Pemilu dari 12 Perguruan Negeri Indonesia yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Indonesia, Universitas	Bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu	Pusat Pengembangan Kompetensi SDM	a. Terbitan I : Bulan Februari s.d Mei b. Terbitan II : Bulan Juli s.d November Tempat : Kantor KPU RI Cideng	Buku		a. Jurnal TKPI diterbitkan 2 kali dalam 1 tahun pada bulan Mei dan November. b. Jurnal TKPI yang sudah diterbitkan melalui link https://jurnal.kpu.go.id/index.php/TKP

				Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Nusa Cendana, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Cendrawasih						
	k	Informasi yang dikuasai Biro Umum								
		1	62/BA/X/2015 dan KN.00.00/136/20 15 (17 Oktober 2015)	- BA Penyerahan Arsip Statis yang meliputi: Peraturan- Peraturan KPU Tahun 2007, 2008, dan 2009; - Berkas Audit Dana	Biro Umum	Sekretaris Jenderal	Jakarta, (17 Oktober 2015)	Dokumen Digital/Soft copy	1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 3 Tahun (Inaktif) permanen	Biasa/Terbuka (berdasarkan Keputusan KPU Nomor 190 Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip

				Kampanye Tahun 2009 (Hasil Audit Calon Provinsi seluruh Indonesia); • Keputusan KPU, Berita Acara, Model E, dan Pergantian Antar Waktu						
		2	75/BA/XII/2016 dan KN.00.04/161/2016 (18 Desember 2016)	BA Penyerahan Arsip Statis yang meliputi: • Peraturan-Peraturan KPU Tahun 2013; • Keputusan KPU tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Anggota, serta Kepala			Jakarta, (18 Desember 2016)			

				Sekretariat dan Pelaksana PPLN di Luar Negeri Tahun 2013; • Arsip Video kegiatan Pemilu 2014; • Arsip Foto Dokumentasi Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Tahun 2004, 2009, 2014); • Dokumentasi Pelantikan Komisioner KPU RI Periode 2002-2017; • Gladi Bersih Pelantikan &						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Pelantikan Anggota DPD/DPR RI terpilih 2004: • Pendaftaran dan Pengambilan Nomor Urut Capres dan Cawapres Pemilu 2009						
	3	7/TU.04.3-BA/04/SJ/04/SJ/XI/2019 dan KN.00.04/429/2019 (21 November 2019)	Penyerahan Arsip Statis yang meliputi: • Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2019 pada PPLN di Luar Negeri			Jakarta, (21 November 2019)				
	4	14/TU.04.3-BA/04/SJ/04/XI/2019 dan KN.00.04/131/20	Penyerahan Arsip Statis yang meliputi: • Peraturan-Peraturan			Jakarta, (22 Juni 2020)				

			20 (22 Juni 2020)	KPU Tahun 2013, 2014, dan 2015						
		5	5/TU.04.3- BA/03/2023 dan KN.00.02/143/20 23 (2 Mei 2023)	Penyerahan Arsip Statis yang meliputi: Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2019 pada PPLN di Luar Negeri.			Jakarta, (2 Mei 2023)			
		6	1/TU.04.3- BA/03/2024 dan KN.00.02/16/202 4 (10 Januari 2024)	BA Penyerahan Arsip Statis yang meliputi: • Risalah/Doku mentasi persidangan/r apat pimpinan Tahun 2008 s.d. 2019; • Produk Hukum/Perat uran Perundang- undangan Peraturan KPU Tahun			Jakarta, (10 Januari 2024)			

				2018 dan 2019;						
		7	5/TU.04.3- BA/03/2024 dan KN.00.02/103/20 24 (5 April 2024)	BA Penyerahan Arsip Statis yang meliputi: Arsip statis penanganan Covid-19 yang tercipta dari hasil pekerjaan/keg iatan KPU sesuai daftar arsip.			Jakarta, 5 April 2024)			
		8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025	Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum	Biro Umum	Ketua KPU	Jakarta, 25 September 2025	Dokumen Digital/Softc opy		

				Kabupaten/Kota						
		9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Mengatur mengenai Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Umum	Ketua KPU	Jakarta, 25 September 2025	Dokumen Digital/Softcopy	2 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 3 Tahun (Inaktif) permanen	Terbuka
		10	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2019 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi	Biro Umum	Sekretaris Jenderal KPU	Jakarta, 19 September 2025	Dokumen Digital/Softcopy	2 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 3 Tahun (Inaktif) permanen	Terbuka

			Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

C. INFORMASI SERTA MERTA

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik	Pejabat Penanggung Jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Keterangan/ Catatan Informasi Publik
1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketentuan tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Ketua KPU	Jakarta, 11 November 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Penyelenggara Pemilu

	Kabupaten/Kota	dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota						
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketentuan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU	Jakarta, 22 Desember 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum	Ketentuan tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua KPU	Jakarta, 31 Desember 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

	Tahun 2025-2029	2025-2029						
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Ketentuan tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Ketua KPU	Jakarta, 08 Juli 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 783 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan	Biro Sumber Daya Manusia	Ketua KPU	Jakarta, 12 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

		Umum						
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 805 Tahun 2025 tentang Pencabutan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum	Ketentuan tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU	Jakarta, 16 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum	Biro Umum	Ketua KPU	Jakarta, 25 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

		Kabupaten/Kota						
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 783 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Ketua KPU	Jakarta, 12 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024
9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi	Inspektorat Utama	Ketua KPU	Jakarta, 26 September 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

	Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						
10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Inspektorat Utama	Ketua KPU	Jakarta, 21 Oktober 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat Utama	Ketua KPU	Jakarta, 4 November 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

	Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						
12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Keuangan	Ketua KPU	Jakarta, 20 November 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan	Inspektorat Utama	Ketua KPU	Jakarta, 5 Desember 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

	Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						
14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1119 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025	Ketentuan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025	Kepala Bidang Data dan Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	17 Desember 2025 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak)	Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun	Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak
15	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026	Ketentuan tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026	Biro Hukum	Ketua KPU	Jakarta, 13 Januari 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

16	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Ketua KPU	Jakarta, 23 Februari 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
17	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2026 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketentuan tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi		Ketua KPU	Jakarta, 26 Februari 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

		Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						
18	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU	Jakarta, 8 April 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
19	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum	Ketentuan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum	Biro Sumber Daya Manusia	Ketua KPU	Jakarta, 4 Mei 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

	Kabupaten/Kota	Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						
20	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 264 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026	Ketentuan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026	Kepala Bidang Data dan Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	20 Juli 2026 di Jakarta	Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak)	Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun.	